PEMINJAMAN NAMA PERUSAHAAN OLEH DIREKSI KEPADA PIHAK KE TIGA DALAM PERSORAN TERBATAS

COMPANY NAME LENDING OF THE BOARD DIRECTORS TO THIRD PARTIES IN A COMPANY

Sidrotul Akbar

Kejaksaan Negeri Kota Cirebon
sidrrotulakbar@gmail.com

Submitted: February 24, 2020; Reviewed: March 19, 2020; Accepted: April 6, 2020
DOI: 10.25041/iplr.v1i1.2046

Abstrak

Tindakan Direksi berupa meminjamkan nama perusahaan kepada orang lain yang tidak memiliki kapasitas untuk melakukan perbuatan hukum atas nama perusahaan pada dasarnya merupakan tindakan yang bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Apabila hal tersebut dilakukan, maka secara normatif dapat dipahami bahwa Direksi telah lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam menjalankan perusahaan. Penelitian ini dilakukan dengan mendasar pada permasalahan mengenai konsepsi peminjaman nama perusahaan sebagai tindakan *ultra vires* serta analisa terhadap tanggung jawab Direksi atas tindakan *ultra vires*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.

Kata Kunci: Peminjaman Nama Perusahaan, Direksi, Pihak Ketiga.

Abstract

*The actions of the Board of Directors in the form of lending the name of the company to other people who have the capacity to take legal actions on behalf of the company are basically actions that are contrary to Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. If it is done, then it normatively can be understood that the Board of Directors has been negligent in carrying out its duties and responsibilities in running the company. This research was conducted on the basis of the problem regarding the concept of borrowing the company name as an *ultra vires* act and an analysis of the responsibilities of the Board of Directors for *ultra vires* actions. This research uses normative legal research methods.*

Keywords: *Borrowing Company Name, Directors, Third Parties.*

A. Pendahuluan

Perseroan Terbatas (PT) merupakan salah satu jenis badan hukum yang berbentuk perusahaan dan dimiliki oleh swasta.¹ Dalam suatu perseroan terdapat direksi sebagai salah satu organ perseroan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terkait kepengurusan Perseroan tersebut.² Atas kekuasaan hukum yang diberikan kepada Direksi, maka direksi dapat bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas.³ Tanggungjawab direksi sepanjang untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar perseroan.⁴ Kedudukan Direksi memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga eksistensi suatu perusahaan, meskipun demikian, dalam melaksanakan pengurusan perusahaan terdapat ketentuan-ketentuan yang membatasi kewenangan bertindak bagi Direksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, hal tersebut dimaksudkan agar dalam menjalankan perusahaan tidak terdapat kepentingan pribadi yang melekat pada Direksi.⁵

Direksi merupakan organ yang menghidupkan perseroan. Tanpa adanya direksi maka perseroan tidak dapat menjalankan kewajibannya, karena segala kegiatan perseroan dijalankan oleh direksi.⁶ Pada saat direksi menjalankan tugas kepengurusannya harus dilaksanakan berdasarkan pada itikad baik dan tanggung jawab.⁷ Namun apabila direksi terbukti bersalah atau lalai dan perseroan mengalami kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya, maka direksi dapat digugat secara pribadi ke Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 97 ayat (3) UU Perseroan Terbatas 2007.⁸ Ridwan Khairandy menyatakan bahwa saat tindakan Direksi bertentangan dengan maksud tujuan perseroan, maka tindakan tersebut dapat batal demi hukum dan tergolong sebagai tindakan yang tidak sah oleh hukum. Adapun perseroan terlepas dari tindakan Direksi tersebut dan bukan merupakan tanggungjawab perusahaan, namun menjadi tanggungjawab Direksi bersangkutan secara pribadi. Hal tersebut dikarenakan suatu tindakan yang tidak termasuk dalam tujuan perseroan terbatas, atau tindakan yang berada di luar kecakapan bertindak perseroan terbatas tergolong kedalam perbuatan *ultra vires*.⁹

Berdasarkan ketentuan diatas maka diketahui bahwa maksud dan tujuan perusahaan sebagaimana termuat dalam Anggaran Dasar merupakan pedoman bagi Direksi dalam menjalankan kegiatan usaha perusahaan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka perusahaan menjalankan fungsi-fungsi perusahaan yaitu fungsi operasional, fungsi pemasaran, fungsi pengembangan SDM (sumber daya manusia), dan fungsi keuangan.¹⁰ Namun, secara umum tujuan dari perusahaan adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumen.¹¹ Adapun pengertian

¹ Rizha Claudilla Putri, "BENTUK HUKUM PERUSAHAAN PERSEKUTUAN DI INDONESIA DAN PERBANDINGANNYA DI MALAYSIA PARTNERSHIP LEGAL FORM IN INDONESIA AND ITS COMPARASION IN MALAYSIA," *Cepalo* 4, no. 1 (2020): 28–37, 29, DOI: 10.25041/cepalo.v4no1.1913.

² Shinta Ikayani Kusumawardani, "PENGATURAN KEWENANGAN, DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM PERSEROAN TERBATAS (STUDI PERBANDINGAN INDONESIA DAN AUSTRALIA)," *Jurnal Magister Hukum Udayana* 2, no. 1 (2013): 1-29, 3, DOI: 10.24843/JMHU.2013.v02.i01.p12.

³ Trusto Subekti, "BATASAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI ATAS KERUGIAN PERUSAHAAN," *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 1 (2008): 21-28, 23.

⁴ Ghansam Anand, "AKIBAT HUKUM SAHAM YANG DIKELUARKAN PERSEORAN TANPA TERLEBIH DAHULU DITAWARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM," *Yuridika* 27, No 3, 2012, 234-244, 236, DOI: 10.20473/ydk.v27i3.298.

⁵ Raffles, "EKSISTENSI DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS," *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 4 (2010): 67-73, 67.

⁶ Siti Hapsah Isfardiya, "TANGGUNG JAWAB DIREKSI PERSEROAN TERBATAS DALAM PELANGGARAN FIDUCIARY DUTY," *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2015): 168-191, 170, DOI: 10.22304/pjih.v2n1.a10.

⁷ Verina Yuwono Setianto, "PERTANGGUNGJAWABAN PRIBADI DIREKSI PADA PERSEROAN TERBATAS YANG PAILIT," *Mimbar Yustitia* 1, no. 2 (2017): 202-221, 207.

⁸ Puspaningrum, "TANGGUNG JAWAB ORGAN PERSEROAN TERBATAS (PT) DALAM KEPAILITAN," *Wacana Hukum* 9, no. 2 (2011): 103.

⁹ Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009), 229.

¹⁰ Siti Nurhayati, "PERANAN MANAJEMEN KEUANGAN DALAM SUATU PERUSAHAAN," *JBMA* 9, no. 1 (2017): 85-94, 85.

¹¹ Satriasca Sagitha Surya I Nyoman Suyatna, "AKIBAT HUKUM BENTUK-BENTUK RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN DI INDONESIA," *Kertha Semaya* 2, no. 5 (2014): 1-6, 2.

dari maksud dan tujuan sebagaimana termuat dalam penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Perseroan Terbatas adalah usaha pokok perseroan, sehingga ketika Direksi menjalankan kegiatan perusahaan namun tidak sesuai dengan usaha pokok perusahaan yang telah ditentukan dalam Anggaran Dasar perseroan, maka tindakan tersebut termasuk dalam ruang lingkup *ultra vires*.¹²

Adapun tindakan yang dikonsepsikan sebagai perbuatan *ultra vires* dalam penelitian ini adalah kasus peminjaman nama PT Daksina Persada oleh Direksi kepada orang lain di luar struktur kepengurusan perusahaan untuk mengikuti lelang dan mengerjakan proyek *land clearing* Bandara Raden Inten II Lampung pada tahun 2014. Pelaksanaan lelang dan pengerjaan proyek tersebut dilakukan oleh Budi Rahmadi dengan mengatasnamakan PT Daksina Persada mendasar pada surat kuasa yang tertuang dalam Akta Notaris Nomor 169 tanggal 26 Juni 2014. Perbuatan tersebut telah membawa akibat hukum berupa penjatuhan sanksi pidana atas keterlibatan Budi Rahmadi dalam tindak pidana korupsi sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 4/PID.SUS/TPK/2017/PT.TJK tertanggal 23 Maret 2017, sehingga berdampak pada timbulnya kerugian bagi PT Daksina Persada akibat adanya larangan dari pemerintah untuk tidak lagi melakukan satu kegiatan usaha sebagaimana termuat dalam anggaran dasar yaitu usaha di bidang pembangunan.

Penelitian ini memfokuskan terkait bagaimana permasalahan konsepsi peminjaman nama perusahaan sebagai tindakan *ultra vires* (studi kasus PT Daksina Persada)? serta bagaimana analisa terhadap tanggung jawab Direksi atas tindakan *ultra vires*? Adapun jenis penelitian pada artikel ini menggunakan hukum normatif yang menggunakan pendekatan konseptual. Penelitian bertujuan untuk menguraikan konsep dan menganalisa tindakan *ultra vires*.

B. Pembahasan

1. Konsepsi Peminjaman Nama Perusahaan oleh Direksi Sebagai Tindakan *Ultra Vires* (Studi Kasus PT Daksina Persada)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau Undang-Undang Perseroan Terbatas pada dasarnya tidak mengatur secara jelas dan terperinci mengenai bentuk tindakan *ultra vires*, akan tetapi konsepsi mengenai *ultra vires* dapat dipahami melalui Pasal 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Istilah *ultra vires* kerap kali digunakan kepada setiap tindakan yang dilakukan oleh perseroan, namun tindakan tersebut melebihi batas kekuasaan yang telah ditetapkan oleh peraturan yang menjadi landasan pembentukan perseroan yang bersangkutan, kerap kali peraturan ini disebut dengan anggaran dasar.¹³ Tindakan *ultra vires* yang melampaui batas kewenangan dari perseroan, bisa menjadi tindakan Direksi yang sah. Artinya, tindakan yang dilakukan oleh Direksi adalah untuk mengurus dan mewakili perseroan dalam menjalankan fungsinya, namun tindakan ini sering kali disalahgunakan hingga tidak sesuai dengan tujuan perseroan yang telah ditetapkan sejak awal.¹⁴

Suatu perusahaan wajib mempunyai Anggaran Dasar yang di dalamnya memuat maksud dan tujuan perusahaan berupa uraian tentang usaha pokok dari perusahaan dimaksud, serta memuat kegiatan usaha berupa uraian tentang kegiatan yang akan dijalankan untuk mencapai maksud dan tujuan perusahaan. Keberadaan Anggaran Dasar sangat penting bagi perusahaan, selain sebagai pedoman Direksi menjalankan perusahaan, anggaran dasar juga dapat menjadi

¹² Dwi Suryahartati, "DOKTRIN ULTRA VIRES (PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS)", *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 7 (2013): 113-126, 113.

¹³ Sandra Dewi, "PRINSIP PIERCING THE CORPORATE VEIL DALAM PERSEROAN TERBATAS DIHUBUNGKAN DENGAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE", *Jurnal Hukum Respublica* 16, no. 2 (2017): 262.

¹⁴ Hasbullah F Sjawie, "TANGGUNG JAWAB DIREKSI PERSEROAN TERBATAS ATAS TINDAKAN ULTRA VIRES", *Jurnal Hukum Prioris* 6, no. 1 (2017): 252-266, 24, DOI: 10.31849/respublica.v16i2.1439.

tolok ukur penilaian untuk menentukan suatu tindakan yang dilakukan oleh Direksi termasuk dalam ruang lingkup *ultra vires* atau tidak. Direksi sebagai salah satu organ dalam perseroan terbatas mempunyai fungsi penting dalam menjalankan perseroan, seperti fungsi pengelolaan dan fungsi perwakilan Anggota Direksi. Namun Direksi kerap kali melakukan tindakan *ultra vires* ketika menjalankan fungsinya dibandingkan organ perseroan lain. Adapun terdapat konsekuensi bagi Direksi saat menjalankan fungsi tersebut, yaitu saat menjalankan fungsi perseroan Direksi diharuskan mengambil suatu keputusan dan Direksi sebagai perwakilan perseroan dalam meneruskan setiap keputusan yang diambil. Oleh karena itu, Direksi memiliki tanggungjawab besar apabila terdapat risiko pada keputusan yang telah diambil.¹⁵

Tindakan *ultra vires* yang dikonsepsikan dalam penelitian ini mengacu pada contoh kasus sebagaimana telah dikemukakan dalam bab pendahuluan, yaitu terkait dengan adanya tindakan Direksi PT Daksina Persada berupa meminjamkan nama perusahaan kepada seseorang melalui surat kuasa tertanggal 26 Juni 2014 kepada seseorang yang bernama Budi Rahmadi selaku pihak yang bukan termasuk dalam struktur kepengurusan perusahaan dalam Anggaran Dasar. Peminjaman nama perusahaan melalui surat kuasa tersebut dipergunakan oleh Budi Rahmadi untuk mengikuti lelang dan mengerjakan proyek *land clearing* Bandara Raden Inten II Lampung pada tahun 2014 dengan mengatasnamakan PT Daksina Persada. Kedudukan Budi Rahmadi selaku pihak yang namanya tidak tercantum dalam anggaran dasar PT Daksina Persada, maka penggunaan dan pembuatan surat kuasa tersebut secara yuridis telah bertentangan dengan Pasal 86 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peminjaman nama perusahaan melalui surat kuasa pada dasarnya dapat dinilai sebagai suatu tindakan *ultra vires*, sebab pemberian surat kuasa yang dilakukan oleh Direksi PT Daksina Persada dapat dipahami sebagai suatu tindakan pelimpahan kewenangan untuk menjalankan kegiatan perusahaan kepada orang lain. Dengan demikian, tindakan Direksi PT Daksina Persada secara faktual merupakan tindakan yang bertentangan dengan Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, serta bertentangan dengan Pasal 12 angka 2 Anggaran Dasar PT Daksina Persada yang mengatur tentang kewajiban kehati-hatian, itikad baik, dan tanggung jawab bagi Direksi dalam melakukan perannya, yang berpedoman pada hukum atau peraturan yang berlaku, serta Anggaran Dasar dalam Perseroan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, diketahui bahwa terdapat akibat hukum yang timbul terkait dengan peminjaman nama perusahaan yang dilakukan oleh Direksi PT Daksina Persada kepada Budi Rahmadi, yakni terjadinya tindak pidana korupsi dengan melibatkan nama PT Daksina Persada sehubungan dengan pelaksanaan lelang dan pengerjaan proyek *land clearing* Bandara Raden Inten II Lampung pada tahun 2014 sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 4/PID.SUS/TPK/2017/PT.TJK tertanggal 23 Maret 2017. Disamping itu berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis pada PT Daksina Persada, diperoleh keterangan melalui narasumber yakni Sri Maryani Langen Hardjo selaku Komisaris PT Daksina Persada bahwa akibat keterlibatan nama perusahaan dalam tindak pidana korupsi dimaksud, maka saat ini PT Daksina Persada mendapat sanksi dari pemerintah sehingga tidak dapat melakukan salah satu kegiatan usaha perseroan di bidang pembangunan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Anggaran Dasar PT Daksina Persada.

Berdasarkan contoh kasus tersebut, dapat dianalisis bahwa peminjaman nama perusahaan yang dilakukan oleh Direksi kepada orang lain yang bukan termasuk dalam struktur pengelolaan sebagaimana termuat dalam Anggaran Dasar sehingga berakibat pada timbulnya

¹⁵ Irawati, "PRINSIP PIERCING THE CORPORATE VIEL TERHADAP TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 6, no. 2 (2018): 157-170, 159, DOI: 10.25157/jigj.v6i2.1711.

kerugian yang dialami perusahaan adalah termasuk dalam ruang lingkup tindakan *ultra vires*, sebab ketika Direksi secara tanpa hak dan melawan hukum meminjamkan nama perusahaan kepada orang lain untuk dipergunakan sebagai identitas melakukan kegiatan usaha yang bukan untuk kepentingan perusahaan secara yuridis dapat dinilai bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan itikad tidak baik serta merupakan bentuk tindakan yang tidak bertanggungjawab terhadap perusahaan.

Selain ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar perusahaan, Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas merupakan tolok ukur yang dapat dijadikan dasar uji apakah Direksi dalam menjalankan perusahaan melakukan tindakan *ultra vires* atau tidak, sebab konsep dasar mengenai *ultra vires* terletak pada adanya unsur perbuatan yang melampaui kewenangan bertindak. Hal ini telah termuat dalam peraturan perundang-undangan, serta Anggaran Dasar perusahaan. Apabila hal tersebut dikaitkan dengan kasus peminjaman nama PT Daksida Persada, berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis secara faktual diketahui bahwa tindakan Direksi dalam meminjamkan nama perusahaan dinilai telah melanggar ketentuan Pasal 12 angka 2 Anggaran Dasar PT Daksina Persada, sehingga perbuatan dimaksud merupakan bentuk perbuatan yang tidak sah berdasarkan Pasal 12 angka 12 Anggaran Dasar PT Daksina Persada sehingga secara normatif dapat dipahami sebagai tindakan *ultra vires*.

2. Pemenuhan Tanggung Jawab Bagi Direksi yang Melakukan Tindakan *Ultra Vires*

Saat menjalankan wewenang dan tugasnya, Direksi berdasarkan pada dua prinsip dasar yakni *Duty of Skill and Care Principle* atau prinsip yang mengacu pada kehati-hatian Direksi dalam mengambil tindakan dan *Fiduciary Duty Principle* atau prinsip kepercayaan.¹⁶ Dalam penelitian ini, penulis lebih menitikberatkan pada konsep tanggung jawab yang kedua, yakni tanggung jawab Direksi atas tindakan yang merugikan perusahaan dalam ruang lingkup tindakan *ultra vires*. Tanggung jawab terkait tindakan *ultra vires* yang dilakukan oleh Direksi pada dasarnya timbul akibat dari adanya kelalaian atau kesalahan dalam melakukan pengelolaan perusahaan sehingga menimbulkan kerugian bagi perseroan karena melanggar batasan kewenangan yang diberikan kepadanya melalui Anggaran Dasar. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Pasal ini menyatakan bahwa dalam melaksanakan fungsi dan perannya, Direksi harus berdasarkan pada itikad baik dan tanggung jawab.¹⁷

Bentuk tanggung jawab atas tindakan *ultra vires* pada dasarnya terdapat relevansi dengan dengan konsep tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur pada KUH Perdata yakni Pasal 1365.¹⁸ Adapun bentuk perbuatan melawan hukum dimaksud adalah berkaitan dengan tindakan pengelolaan perusahaan oleh Direksi yang berakibat pada timbulnya kerugian bagi perusahaan karena adanya tindakan-tindakan Direksi yang melanggar prinsip itikad baik serta bertentangan dengan undang-undang dan Anggaran Dasar perusahaan, maka pemenuhan tanggung jawab yang diterapkan kepada Direksi adalah penggantian kerugian atas perbuatan melawan hukum berupa tindakan *ultra vires*. Sehubungan dengan tindakan *ultra vires* yang dilakukan oleh Direksi PT Daksina Persada berupa peminjaman nama perusahaan sebagaimana telah dikemukakan diatas, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk perbuatan melawan hukum atas dilanggarnya

¹⁶ Frankiano B. Randang, "TUGAS DAN WEWENANG SERTA TANGGUNG JAWAB DIREKSI MENURUT UU NO. 1 TAHUN 1995 TENTANG PERSEROAN TERBATAS", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi* 15, no.4 (2008): 1-11, 2.

¹⁷ M. Kurniawan, "TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS", *Mimbar Hukum* 24, no. 2 (2012): 219.

¹⁸ Nur Sa'adah, "TANGGUNG JAWAB PRIBADI DIREKSI TERHADAP UTANG PERSEROAN (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO: 1914 K/PDT/2009)", *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 6, no. 2 (2016): 1-26, 22, DOI: 10.32493/jdmhkdmdhk.v6i2.331.

Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Dengan demikian landasan yuridis yang dapat dipergunakan oleh perusahaan untuk menuntut pemenuhan tanggung jawab kepada Direksi adalah Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Pasal 1365 KUH Perdata.

Adapun Beban tanggung jawab yang harus ditanggung oleh Direksi atas tindakan *ultra vires* adalah tanggung jawab tidak terbatas sampai dengan harta pribadinya, akan tetapi pemenuhan tanggung jawab tersebut tidak dapat dilakukan secara serta merta, sebab substansi Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas telah menegaskan bahwa Direksi dapat dibebaskan dari kewajiban untuk bertanggung jawab apabila:

- a. Suatu kelalaian atau kesalahan dari Direksi tidak menyebabkan kerugian.
- b. Dalam menjalankan tugasnya, Direksi berdasarkan pada maksud dan tujuan perseroan. Serta berdasarkan kehati-hatian dan itikad baik dalam melaksanakan kepengurusan perseroan.
- c. Tidak menyebabkan kerugian dan benturan kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung dalam segala tindakan kepengurusan yang dilakukan oleh Direksi.
- d. Adanya tindakan pencegahan sebelum timbulnya kerugian tersebut.

Berdasarkan pada ketentuan dimaksud maka dapat dipahami bahwa untuk menuntut pemenuhan tanggung jawab kepada Direksi sebagai akibat dari adanya tindakan *ultra vires* sangat ditentukan pada terbuktinya unsur kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan perusahaan, dengan kata lain, pemenuhan tanggung jawab oleh Direksi hanya dapat dilaksanakan apabila telah terbukti setidaknya-tidaknya hal sebagai berikut:

- a. Direksi dalam menjalankan perusahaan bertentangan dengan maksud dan tujuan perusahaan yang termuat dalam Anggaran Dasar.
- b. Perseroan yang dijalankan oleh Direksi bertentangan dengan kebijakan yang ditentukan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar saat melaksanakan fungsi perseroan.
- c. Direksi tidak beritikad baik dan tidak bertanggungjawab dalam menjalankan perusahaan.

Adapun bentuk pemenuhan tanggung jawab yang dapat dimintakan kepada Direksi sebagai akibat dari tindakan *ultra vires* adalah:

- a. Melalui perspektif hukum perdata berupa pembayaran ganti kerugian terhadap perseroan dengan mendasar pada Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas.
- b. Melalui persepektif hukum pidana dengan mendasar pada Pasal 155 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

C. Kesimpulan

Peminjaman nama perusahaan mendasar pada kasus pinjam nama PT Daksina Persada melalui surat kuasa dari Direksi kepada Budi Rahmadi selaku pihak yang tidak termasuk dalam struktur pengurusan perusahaan sebagaimana termuat dalam Anggaran Dasar untuk digunakan melakukan kegiatan usaha dengan mengatasnamakan PT Daksina Persada pada dasarnya merupakan perbuatan yang melampaui kewenangan bertindak sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas serta Pasal 12 angka 2 Anggaran Dasar PT Daksina Persada sehingga tindakan dimaksud termasuk dalam ruang lingkup tindakan *ultra vires*.

Pemenuhan tanggung jawab Direksi atas tindakan *ultra vires* dapat dilakukan melalui perspektif hukum perdata berupa tanggung jawab tidak terbatas sampai dengan harta pribadinya untuk memberikan ganti kerugian yang dialami oleh perseroan dengan mendasar pada ketentuan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Disamping itu, Direksi juga dapat dituntut untuk melakukan tanggung jawab melalui perspektif hukum pidana dengan mendasar pada ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Ucapan Terima Kasih

Pada kesempatan di artikel ini, Penulis menyampaikan terima kasih yang mendalam khususnya kepada segenap Bapak dan Ibu Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung atas segala kesabarannya dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada Penulis selama menempuh pendidikan, serta kepada rekan-rekan almamater dan seluruh pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan pendidikan pada Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

A. Jurnal

- Anand, Ghansam. "AKIBAT HUKUM SAHAM YANG DIKELUARKAN PERSEORAN TANPA TERLEBIH DAHULU DITAWARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM". *Yuridika* 27, no 3, 2012: 234-244, DOI:10.20473/ydk.v27i3.298.
- Dewi, Sandra. "PRINSIP PIERCING THE CORPORATE VEIL DALAM PERSEROAN TERBATAS DIHUBUNGKAN DENGAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE". *Jurnal Hukum Respublica* 16, no. 2, 2017: 252-266, DOI: 10.31849/respublica.v16i2.1439.
- Irawati. "PRINSIP PIERCING THE CORPORATE VIEL TERHADAP TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS". *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 6, no. 2, 2018: 157-170, DOI: 10.25157/jigj.v6i2.1711.
- Isfardiyana, Siti Hapsah. "TANGGUNG JAWAB DIREKSI PERSEROAN TERBATAS DALAM PELANGGARAN *FIDUCIARY DUTY*", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1, 2015: 168-191, DOI: 10.22304/pjih.v2n1.a10.
- Kusumawardani, Shinta Ikayani. "PENGATURAN KEWENANGAN, DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM PERSEROAN TERBATAS (STUDI PERBANDINGAN INDONESIA DAN AUSTRALIA)". *Jurnal Magister Hukum Udayana* 2, no. 1, 2013: 1-29, DOI: 10.24843/JMHU.2013.v02.i01.p12.
- M. Kurniawan. "TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS". *Mimbar Hukum* 24, no. 2, 2012: 213-225, DOI: 10.22146/jmh.16126.
- Nurhayati, Siti. "PERANAN MANAJEMEN KEUANGAN DALAM SUATU PERUSAHAAN". *JBMA* 4, no. 1, 2017: 85-94.
- Puspaningrum. "TANGGUNG JAWAB ORGAN PERSEROAN TERBATAS (PT) DALAM KEPAILITAN", *Wacana Hukum* 9, no. 2, 2011: 99-110.
- Putri, Rizha Claudilla. "BENTUK HUKUM PERUSAHAAN PERSEKUTUAN DI INDONESIA DAN PERBANDINGANNYA DI MALAYSIA PARTNERSHIP LEGAL FORM IN INDONESIA AND ITS COMPARASION IN MALAYSIA," *Cepalo* 4, no. 1, 2020: 28-37, DOI: 10.25041/cepalo.v4no1.1913.
- Raffles. "EKSISTENSI DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS". *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 4, 2010: 67-73.
- Randang, Frankiano B. "TUGAS DAN WEWENANG SERTA TANGGUNG JAWAB DIREKSI MENURUT UU NO. 1 TAHUN 1995 TENTANG PERSEROAN TERBATAS", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi* 25, no.4, 2008: 1-11.
- Sa'adah, Nur. "TANGGUNG JAWAB PRIBADI DIREKSI TERHADAP UTANG PERSEROAN (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO: 1914 K/PDT/2009)". *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 6, no. 2, 2016: 1-26, DOI: 10.32493/jdmhkdmdhk.v6i2.331.

- Setianto, Verina Yuwono. "PERTANGGUNGJAWABAN PRIBADI DIREKSI PADA PERSEROAN TERBATAS YANG PAILIT". *Mimbar Yustitia* 1, no. 2, 2017: 202-221.
- Sjawie, Hasbullah F. "TANGGUNG JAWAB DIREKSI PERSEROAN TERBATAS ATAS TINDAKAN ULTRA VIRES". *Jurnal Hukum Prioris* 6, no. 1, 2017.
- Subekti, Trusto. "BATASAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI ATAS KERUGIAN PERUSAHAAN". *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 1, 2008: 21-28.
- Suryahartati, Dwi. "DOKTRIN ULTRA VIRES (PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS)", *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 7, 2013: 113-126.
- Suyatna, Satriasca Sagitha Surya I Nyoman. "AKIBAT HUKUM BENTUK-BENTUK RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN DI INDONESIA". *Kertha Semaya* 2, no. 5, 2014: 1-6.

B. Buku

Khairandy, Ridwan. *Hukum Perseroan Terbatas*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009.

C. Peraturan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas